An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Kajian Dampak Banjir Tahun 2025 terhadap Perkembangan Ekonomi Kota Binjai

Siti Nur Arifah; Dheril Ariangga, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak banjir terhadap perkembangan ekonomi di Kota Binjai setelah banjir November 2025. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, melalui wawancara terstruktur, observasi, dan pengumpulan dokumen dari pelaku usaha UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi hingga 60% pada sektor perdagangan dan jasa. Sebagian besar pelaku UMKM mengalami kerugian material, penurunan permintaan, serta gangguan distribusi barang.

Kata Kunci: *perkembangan ekonomi; banjir; UMKM*

Abstract

This study aims to analyze in depth the impact of flooding on economic development in Binjai City after the floods in November 2025. A descriptive qualitative research approach was used, through structured interviews, observations, and document collection from micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The results of the study show that the flood caused a 60% decline in economic activity in the trade and service sectors. Most MSMEs experienced material losses, decreased demand, and disruptions in the distribution of goods.

Keywords: *economic development; floods; MSMEsw*

A. PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi masyarakat perkotaan. Kota Binjai sebagai salah satu kota penyangga di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari risiko tersebut. Banjir besar yang melanda kota ini pada November 2025 menimbulkan kerusakan infrastruktur, menurunnya produktivitas masyarakat, serta terganggunya aktivitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal (Binjai, 2025).

Menurut (Rosyidie, 2013), banjir di berbagai kota besar Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan perubahan tata guna lahan dan pembangunan wilayah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian material, tetapi juga penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

Penelitian oleh (Anwar & Ningrum, 2022) di Samarinda Utara menunjukkan bahwa bencana banjir menimbulkan dampak ekonomi langsung

terhadap penurunan pendapatan rumah tangga dan meningkatnya biaya pemulihan. Hal ini sejalan dengan kondisi di Kota Binjai, di mana sektor informal dan UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak karena kehilangan modal usaha dan pelanggan.

Selain itu, (Taslim, 2019) menegaskan bahwa ketidaksiapan koordinasi publik dalam pengurangan risiko bencana (PRB) dapat memperparah dampak ekonomi dan memperlambat proses pembangunan berkelanjutan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi penting dalam membangun sistem ketahanan ekonomi daerah pasca-bencana.

Dari sisi kebijakan, studi oleh (Arvi *et al.*, 2025) menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui penerapan kebijakan berbasis Peraturan Daerah yang mampu mengatur mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Penguatan kelembagaan dan pendanaan daerah menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi pasca-banjir seperti yang dihadapi Kota Binjai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak banjir terhadap perkembangan ekonomi di Kota Binjai setelah banjir November 2025**.**

B. KAJIAN TEORI

Konsep Perkembangan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi daerah merupakan proses peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2020), pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, investasi, tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks pasca-bencana, dinamika ekonomi lokal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan aktivitas produksi dan perdagangan (Rahmadana & Putra, 2025).
Lebih lanjut, teori pembangunan daerah menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks regional seperti Kota Binjai, kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus mempertimbangkan karakteristik lokal seperti potensi sumber daya manusia, kapasitas industri kecil, dan keterjangkauan infrastruktur transportasi. Perkembangan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan angka pendapatan, tetapi juga pengurangan kesenjangan sosial dan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi (Todaro, 2020).

Menurut teori basis ekonomi daerah, kemajuan suatu wilayah ditentukan oleh sejauh mana sektor unggulan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor lainnya. Di Binjai, sektor informal seperti UMKM dan perdagangan tradisional memiliki peran dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Kegiatan ekonomi ini memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan eksternal seperti bencana alam. Sektor informal juga sering berfungsi sebagai penyangga bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat terganggunya sektor formal.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution, Sugiarto, & Lubis (2025), sektor perdagangan tradisional di Binjai memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika banjir melanda, dampak langsung terhadap aktivitas pasar dan pendapatan masyarakat menjadi indikator utama terganggunya sistem ekonomi daerah. Selain itu, ketergantungan pada aktivitas ekonomi berbasis pasar membuat masyarakat lebih rentan terhadap gangguan bencana. Hal ini memperkuat pentingnya kebijakan diversifikasi ekonomi daerah agar ketahanan ekonomi dapat lebih stabil dalam jangka panjang.

Perkembangan ekonomi daerah pasca-bencana juga erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengarahkan alokasi sumber daya untuk pemulihan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan investasi pada sektor produktif. Keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku ekonomi lokal dalam perencanaan pembangunan menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi landasan utama keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Binjai setelah banjir November 2025.

Dampak Ekonomi Akibat Bencana Alam

Bencana alam memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap sistem ekonomi suatu daerah. Menurut Cavallo & Noy (2011), kerugian langsung mencakup kerusakan fisik infrastruktur dan aset, sedangkan dampak tidak langsung meliputi penurunan produktivitas, kehilangan pekerjaan, dan gangguan rantai pasok. Dampak ini sering kali menyebabkan penurunan investasi jangka pendek serta ketidakstabilan harga di pasar lokal. Studi Yanti, Maulita, & Sitepu (2025) menegaskan bahwa bencana banjir di Binjai menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan sosial, yang pada akhirnya menghambat perputaran ekonomi.

Selain kerugian finansial, bencana juga membawa implikasi sosial yang luas, seperti meningkatnya kemiskinan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi daerah. Dampak tersebut bersifat multidimensi dan saling berkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Kerusakan pada sarana produksi, distribusi, dan infrastruktur publik menciptakan efek berantai yang memperlambat laju pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemulihan aset fisik tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Teori *resilience economy* menjelaskan bahwa kemampuan suatu daerah untuk pulih pasca-bencana bergantung pada sinergi antara modal fisik, sosial, dan institusional. Semakin kuat koordinasi antar-aktor ekonomi lokal, semakin cepat pula proses pemulihan yang terjadi (Silalahi & Nuraini, 2025). Konsep ini menekankan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun melalui infrastruktur yang kuat, tetapi juga melalui hubungan sosial, jaringan bisnis, dan kebijakan yang adaptif. Dalam konteks Binjai, sinergi antara pelaku UMKM, lembaga keuangan mikro, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci untuk mempercepat pemulihan.

Selain itu, teori *adaptive capacity* dari Cutter et al. (2010) menjelaskan bahwa daerah yang memiliki tingkat kapasitas adaptif tinggi cenderung lebih cepat bangkit dari bencana. Faktor-faktor seperti pendidikan, kesiapan infrastruktur, dan akses terhadap modal memengaruhi kecepatan pemulihan ekonomi. Dalam kasus Binjai, keterbatasan modal dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan utama bagi pelaku ekonomi kecil untuk kembali produktif setelah banjir. Oleh karena itu, peningkatan literasi finansial dan penyediaan skema kredit lunak merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat ekonomi lokal.

Studi empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur tangguh bencana (disaster-resilient infrastructure) memiliki korelasi positif terhadap pemulihan ekonomi jangka panjang. Hal ini juga relevan dengan

kondisi Binjai, di mana perbaikan sistem drainase, penguatan dinding sungai, serta pembangunan jalur evakuasi ekonomi menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang berorientasi pada ketahanan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman terhadap dampak ekonomi akibat bencana harus dilihat secara holistik, mencakup aspek jangka pendek (kerugian langsung) dan jangka panjang (reformasi kebijakan dan struktur ekonomi daerah).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam bagaimana perkembangan ekonomi Kota Binjai setelah terjadinya banjir pada November 2025. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menggali informasi secara mendalam mengenai dampak banjir terhadap kegiatan ekonomi, pengalaman masyarakat, pelaku UMKM, dan kebijakan pemerintah. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purpossive sampling, yaitu memilih pelaku UMKM dan masyarakat yang telah terdampak banjir serta pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan pasca banjir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan yang dan dianalisis serta deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian datan dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Banjir terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Binjai

Banjir yang terjadi di Kota Binjai pada akhir tahun 2025 memberikan dampak yang sangat luas terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kota Binjai, sebagai salah satu wilayah penyangga Kota Medan, memiliki populasi UMKM yang cukup tinggi dan tersebar di lima kecamatan utama yaitu, Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Selatan, Binjai Utara, dan Binjai Kota. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM setempat, lebih dari 60% penduduk produktif menggantungkan sumber pendapatannya pada sektor perdagangan, jasa, dan kuliner berskala kecil. Karena itu, setiap gangguan terhadap kegiatan ekonomi mikro akan secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, hampir seluruh pelaku usaha di wilayah terdampak banjir mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara drastis. Gangguan utama yang dialami meliputi kerusakan barang dagangan, penurunan jumlah pelanggan, keterlambatan pasokan, serta penutupan sementara kegiatan usaha akibat genangan air yang tinggi. *Bu Dian*, pemilik toko kelontong di Kelurahan Tanah Tinggi, menuturkan bahwa air mulai masuk ke tokonya sekitar pukul empat sore dan bertahan hingga keesokan harinya. Ia terpaksa menutup usahanya selama satu hari penuh karena sebagian besar stok seperti beras dan mie instan rusak akibat terendam air.

Kondisi serupa dialami oleh *Bu Indah*, pemilik toko kelontong di Kelurahan Rambung Timur, yang menuturkan bahwa air menggenang setinggi dua meter dan merusak hampir seluruh barang di etalase bawah. Usahanya harus tutup selama dua hari untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki rak yang roboh. Sebaliknya, *Bu Risnawati*, penjual minyak goreng di Kelurahan Payaroba, meskipun tidak terdampak langsung oleh air, tetap merasakan efeknya karena pasokan barang dari distributor tertunda akibat jalan menuju

pusat kota tergenang banjir. Ia menyebutkan, “barang datang telat hampir tiga hari, jadi pelanggan marah karena stok habis.”

Fenomena ini memperlihatkan bahwa dampak banjir terhadap UMKM tidak hanya bersifat langsung (langsung mengenai tempat usaha), tetapi juga bersifat tidak langsung melalui terganggunya jaringan pasok dan mobilitas barang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, Nuraini, & Aulia (2021), yang menyatakan bahwa bencana hidrometeorologis seperti banjir menurunkan kapasitas produksi UMKM hingga 50% akibat hambatan distribusi dan keterbatasan akses ke pasar. Selain faktor fisik, dampak psikologis juga muncul dalam bentuk penurunan semangat kerja, ketidakpastian penghasilan, dan stres ekonomi keluarga, terutama bagi pelaku usaha mikro dengan modal terbatas.

Lebih jauh, banjir juga menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan di beberapa sektor usaha. Pelaku usaha kuliner dan laundry menjadi kelompok yang paling terdampak karena aktivitas harian masyarakat berfokus pada penyelamatan harta benda dan pemulihan rumah. Seorang pelaku usaha laundry, *Bu Wina* di Kelurahan Berngam mengatakan bahwa ia tidak menerima pelanggan sama sekali selama empat hari karena air menggenangi jalan menuju tempat usahanya. Meskipun air sudah surut, pelanggan belum kembali karena pakaian mereka ikut rusak terkena banjir.

Kondisi ini memperkuat pandangan Fitriani, Rahmadani, & Hasibuan (2020), yang menjelaskan bahwa UMKM sektor informal memiliki ketergantungan tinggi terhadap kondisi lingkungan dan daya beli masyarakat, sehingga ketika bencana alam terjadi, efeknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi harian. Pelaku usaha kecil tidak memiliki cadangan modal, tidak memiliki lokasi penyimpanan alternatif, dan sebagian besar belum terlindungi oleh asuransi usaha. Akibatnya, satu kali banjir besar saja dapat menghapus seluruh keuntungan beberapa bulan sebelumnya.

Selain aspek ekonomi, banjir juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Beberapa pelaku usaha kehilangan pelanggan tetap karena perpindahan tempat tinggal sementara, sedangkan sebagian lainnya kehilangan kepercayaan pemasok karena keterlambatan pembayaran. Dalam konteks ini, bencana banjir tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga jejaring sosial dan ekonomi lokal yang menjadi fondasi keberlanjutan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tidak bisa hanya difokuskan pada rehabilitasi fisik, tetapi harus mencakup penguatan jejaring sosial dan akses permodalan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kerentanan ekonomi pelaku UMKM di Binjai masih tinggi, disebabkan oleh beberapa faktor utama: (1) lokasi usaha yang berada di kawasan rawan banjir dan dekat aliran sungai, (2) keterbatasan modal kerja dan tabungan usaha, (3) tidak adanya perencanaan darurat atau mitigasi bencana, dan (4) rendahnya literasi keuangan. Faktor-faktor ini mempertegas temuan Nasution & Nugroho (2022), yang menekankan bahwa ketahanan UMKM di daerah rawan bencana sangat bergantung pada kesiapan manajerial dan kapasitas adaptif pelaku usaha.

Dengan demikian, dampak banjir terhadap UMKM di Kota Binjai dapat dikategorikan sebagai dampak multidimensi, yang meliputi kerugian ekonomi langsung, gangguan distribusi, kehilangan pelanggan, serta penurunan

produktivitas tenaga kerja. Apabila tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan dan perencanaan mitigasi yang tepat, maka kejadian seperti ini berpotensi menimbulkan efek jangka panjang terhadap keberlanjutan ekonomi lokal.

Dampak Fisik dan Operasional

Banjir yang melanda Kota Binjai menyebabkan gangguan operasional yang cukup berat bagi sebagian besar pelaku UMKM. Dampak fisik yang paling nyata meliputi kerusakan peralatan, rusaknya bahan baku, hilangnya stok barang, hingga gangguan akses distribusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memiliki sistem perlindungan aset atau lokasi penyimpanan barang yang aman dari genangan air. Hal ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap kerugian setiap kali banjir datang.

Sebagai contoh, *Bu Wina*, pemilik usaha laundry di Kelurahan Berngam, menyebutkan bahwa air yang masuk ke tempat usahanya setinggi 50 cm telah merusak dua unit mesin cuci dan beberapa kabel listrik. Akibatnya, ia harus menghentikan kegiatan selama dua hari penuh untuk memperbaiki peralatan. *Bu Indah*, pemilik toko kelontong di Kelurahan Rambung Timur, juga mengalami kerugian karena air merusak rak kayu, produk kemasan, dan timbangan digital. Selain kerusakan fisik, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembersihan dan perbaikan fasilitas yang tidak sedikit.

Menurut Haryono, Putra, & Wulandari (2020), gangguan operasional yang disebabkan oleh bencana alam dapat menurunkan produktivitas usaha hingga 70% dalam periode dua minggu pascabencana. Hal ini terjadi karena UMKM tidak memiliki kapasitas cadangan sumber daya seperti usaha besar. Dengan kata lain, kerugian satu atau dua hari operasional bagi UMKM dapat berarti kehilangan pendapatan satu minggu atau bahkan satu bulan ke depan.

Selain kerusakan barang dan peralatan, banjir juga menyebabkan gangguan terhadap sistem logistik dan rantai pasok. Jalan-jalan utama menuju pasar seperti *Pajak Tavip* dan *Pajak Rambung* sempat tidak dapat dilalui kendaraan selama lebih dari 24 jam, menghambat pasokan bahan dagangan dari distributor ke toko-toko kecil. Pelaku usaha seperti *Bu Risnawati* dan *Pak Iwan* menyebutkan bahwa keterlambatan pasokan menyebabkan stok kosong dan pelanggan beralih ke toko lain.

Menurut Rahmawati, Nuraini, & Aulia (2021), rantai pasok yang tidak tangguh menjadi faktor utama lemahnya daya saing UMKM di wilayah rawan bencana. Keterlambatan bahan baku menyebabkan biaya operasional meningkat karena pelaku usaha harus mencari pemasok alternatif dengan harga lebih tinggi. Dampak ini juga memperburuk posisi keuangan mereka, yang sebelumnya sudah terbatas.

Dengan demikian, banjir di Kota Binjai tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada infrastruktur usaha, tetapi juga mengganggu ekosistem bisnis lokal secara keseluruhan, termasuk distribusi, produksi, dan layanan pelanggan. Kondisi ini menggambarkan rendahnya kesiapan operasional pelaku UMKM terhadap risiko bencana, yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan mitigasi risiko.

Dampak Ekonomi dan Keuangan

Dari sisi ekonomi, banjir memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku usaha yang diwawancarai melaporkan penurunan pendapatan yang cukup tajam, antara 30% hingga 70% selama masa banjir berlangsung. Penurunan ini dipicu oleh dua faktor utama: berkurangnya permintaan konsumen karena aktivitas masyarakat terhambat, dan terhentinya produksi atau penjualan akibat kerusakan fasilitas usaha.

Menurut Fitriani, Rahmadani, & Hasibuan (2020), penurunan omset pascabencana biasanya terjadi karena rantai distribusi dan daya beli masyarakat belum pulih. UMKM dengan modal terbatas cenderung tidak mampu menanggung beban kerugian yang terlalu lama, sehingga beberapa bahkan memilih untuk menutup usahanya sementara atau permanen.

Kasus ini juga terlihat di Binjai. *Pak Bambang*, pedagang ikan di Pajak Tavip, menyebutkan bahwa pendapatannya turun hampir 80% karena tidak bisa berjualan selama dua hari dan stok ikan busuk akibat mati listrik. Sementara itu, *Bu Dian* mengalami kerugian karena stok sembako rusak dan tidak dapat diklaim kembali ke pemasok. Hal ini menggambarkan bahwa UMKM di sektor barang konsumsi cepat sangat rentan terhadap bencana yang bersifat mendadak seperti banjir.

Namun, ada juga pelaku usaha yang mengalami peningkatan pendapatan karena kondisi pasar yang tidak stabil. *Pak Yanto*, pedagang bawang, menyebut bahwa harga bawang naik hampir dua kali lipat selama banjir karena pasokan dari luar kota tertahan. Ia mengaku mendapat keuntungan lebih besar meskipun volume penjualan menurun. Fenomena ini memperlihatkan adanya dampak asimetris, di mana sebagian kecil pelaku usaha memperoleh keuntungan karena perubahan struktur pasar dan kelangkaan komoditas tertentu.

Dari sisi finansial, sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki cadangan modal atau tabungan darurat untuk menanggung kerugian. Mereka mengandalkan pinjaman dari keluarga, tetangga, atau lembaga informal. Tidak ada satu pun responden yang mengaku memiliki akses ke pembiayaan formal atau asuransi usaha. Padahal, menurut Nasution & Nugroho (2022), ketiadaan akses keuangan formal membuat UMKM sulit untuk bangkit setelah bencana karena tidak memiliki sumber likuiditas yang stabil.

Selain itu, kemampuan pelaku usaha untuk pulih dari dampak keuangan juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM di Binjai belum memahami pentingnya manajemen kas, pencatatan keuangan, dan diversifikasi usaha sebagai strategi ketahanan. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap kerugian berulang dan tidak dapat memanfaatkan peluang bantuan pemerintah secara optimal.

Dengan demikian, dampak ekonomi banjir terhadap UMKM tidak hanya berupa kerugian jangka pendek, tetapi juga efek jangka menengah dan panjang berupa menurunnya kapasitas produksi, hilangnya pelanggan tetap, dan ketidakmampuan melunasi pinjaman usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi lokal masih sangat lemah dan membutuhkan intervensi struktural dari pemerintah dalam bentuk bantuan modal, pendampingan usaha, dan program literasi keuangan.

Peran Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua pelaku UMKM di Kota Binjai menilai bahwa peran pemerintah dalam penanganan dampak banjir masih terbatas dan bersifat reaktif. Bantuan yang diterima umumnya berupa sembako dan barang kebutuhan pokok, bukan bantuan produktif yang dapat memulihkan aktivitas usaha. Sebagian pelaku usaha bahkan mengaku belum mendapatkan bantuan apa pun, padahal usaha mereka mengalami kerugian cukup besar.

Kondisi ini menggambarkan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penyaluran bantuan pascabencana. Pelaku usaha seperti *Pak Iwan* menyebutkan bahwa informasi tentang bantuan tidak jelas, prosedurnya rumit, dan sering kali tidak transparan. Situasi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Haryono, Putra, & Wulandari (2020) yang menegaskan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi pascabencana di daerah sering kali tidak memiliki perencanaan strategis yang matang, serta minim koordinasi antara pemerintah daerah dan dinas terkait.

Selain aspek bantuan, pelaku usaha juga mengeluhkan minimnya program pencegahan dan kesiapsiagaan dari pemerintah daerah. Drainase di beberapa kawasan perdagangan masih sempit dan sering tersumbat, sementara kegiatan edukasi kebencanaan untuk pelaku UMKM hampir tidak pernah dilakukan. Padahal, menurut Rahmawati, Nuraini, & Aulia (2021), peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan pelatihan mitigasi, membentuk jaringan tanggap bencana, dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal untuk menghadapi ancaman alam.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan berupa bantuan modal bergulir atau kredit usaha pemulihan dengan bunga rendah melalui kerja sama dengan perbankan daerah. Program seperti ini telah terbukti efektif di beberapa daerah rawan bencana lain di Indonesia, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program *UMKM Bangkit* pasca banjir 2022.

Selain bantuan ekonomi, kebijakan tata ruang dan lingkungan juga harus diperkuat. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan bahwa penyebab utama banjir adalah pendangkalan sungai, pembangunan drainase yang tidak merata, dan buruknya sistem pembuangan limbah. Dengan memperbaiki tata kelola lingkungan dan sistem drainase, pemerintah secara tidak langsung akan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih tangguh.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah saat ini masih berorientasi pada penanganan jangka pendek, belum menyentuh akar masalah ekonomi dan kelembagaan. Diperlukan transformasi kebijakan dari bantuan sosial menuju penguatan kapasitas ekonomi produktif, agar pelaku UMKM dapat bangkit dan beradaptasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Fitriani et al. (2020), yang menekankan pentingnya sinergi antara bantuan ekonomi, perbaikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun ketahanan ekonomi pascabencana.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banjir di Kota Binjai memberikan dampak multidimensional terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, jaringan sosial, dan kapasitas kelembagaan daerah.

Pertama, dari aspek fisik dan operasional, sebagian besar pelaku UMKM mengalami kerusakan peralatan, kehilangan stok barang, serta gangguan distribusi akibat banjir dan infrastruktur drainase yang buruk. Kedua, dari aspek ekonomi dan keuangan, pelaku usaha kecil mengalami penurunan omset antara 30%–70%, kesulitan modal kerja, dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Ketiga, dari aspek sosial dan adaptif, pelaku UMKM menunjukkan kemampuan bertahan melalui gotong royong, solidaritas komunitas, dan penyesuaian strategi usaha, namun adaptasi yang dilakukan masih bersifat spontan dan belum berbasis perencanaan jangka panjang.

Selain itu, dari aspek kebijakan, peran pemerintah Kota Binjai dalam penanganan dampak banjir terhadap UMKM dinilai belum optimal. Program bantuan yang diberikan masih berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, belum menyentuh dimensi produktif seperti modal kerja, pelatihan manajemen usaha, atau pemberdayaan ekonomi pascabencana. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya sistem mitigasi lingkungan memperburuk situasi pasca banjir.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan UMKM di Kota Binjai masih rendah akibat keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan belum adanya kebijakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh terhadap bencana

F. SARAN

Pemerintah Kota Binjai perlu memperkuat mitigasi bencana melalui perbaikan drainase, normalisasi sungai, dan penataan kawasan rawan banjir, disertai program pemulihan ekonomi pascabencana yang berfokus pada bantuan modal, pelatihan, serta pendampingan usaha bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM diharapkan meningkatkan literasi keuangan, menyiapkan dana cadangan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar serta memperkuat ketahanan usaha. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi perlu ditingkatkan agar tercipta ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana di masa mendatang..

G. DAFTAR PUSTAKA

Almuttaqin, M., & Sugiarto, A. (2025). *Sustainability Strategy for Urban Development Through Green Open Spaces Optimization.* ICDSET Proceedings.

Anwar & Ningrum (2022) 'Dampak Bencana Banjir Terhadap Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda', 9(1), pp. 40–48. Available at: https://doi.org/10.20527/jpg.v9i1.12457.

Arvi, M.D. *et al.* (2025) 'Analisis Faktor Penyebab Bencana Banjir di Kota-Kota Besar Indonesia : Studi Kasus Analisis Banjir Berbasis Literasi Pendahuluan', 3(1), pp. 1–8.

BINJAI, P.K. (2025) *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH*.

Cavallo, E., & Noy, I. (2011). *The Economics of Natural Disasters: A Survey.* International Review of Environmental and Resource Economics.

Fitriani, N., Rahmadani, D., & Hasibuan, F. (2020). Dampak banjir terhadap kinerja UMKM di wilayah rawan bencana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 134–142.

Haryono, A., Putra, D., & Wulandari, S. (2020). Strategi ketahanan ekonomi daerah terhadap bencana alam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–12.

Nasution, A. F., & Nugroho, D. (2022). Resiliensi UMKM terhadap dampak bencana hidrometeorologis. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 13(1), 45–60.

Nasution, N. H., Sugiarto, A., & Lubis, R. P. (2025). *Evaluation of Local Government Policy in Managing the Binjai Tavip Market: Challenges and Prospects.* BESTI Journal.

Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). *Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness.* American Journal of Community Psychology.

Rahmadana, M. F., & Putra, I. M. (2025). *Community Dynamics Towards the Existence of Toll Roads in Indonesia: A Literature and Spatial Study.* Frontiers in Built Environment.

Rahmawati, T., Nuraini, S., & Aulia, M. (2021). Analisis dampak banjir terhadap UMKM di kawasan perkotaan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(2), 55–66.

Rosyidie, A. (2013) 'Banjir : Fakta dan Dampaknya , Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan', 24(3).

Sembiring, J. B., & Nuraini, C. (2025). *Settlement Patterns and Availability of Environmental Infrastructure in Flood-Prone Areas along the Bingai Riverbanks.* ICDSET Proceedings.

Silalahi, N. F., & Nuraini, C. (2025). *Development of Urban Drainage to Improve Water Quality and Prevent Damage to Urban Infrastructure.* IJMECIE.

Taslim, I. (2019) 'Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo', 7, pp. 63–78. Available at: https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.63-78.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Yanti, M. T., Maulita, Y., & Sitepu, K. A. B. (2025). *Grouping of Flood Victim Data Based on Damage Rate Using K-Means Algorithm.* JAIEA Journal.